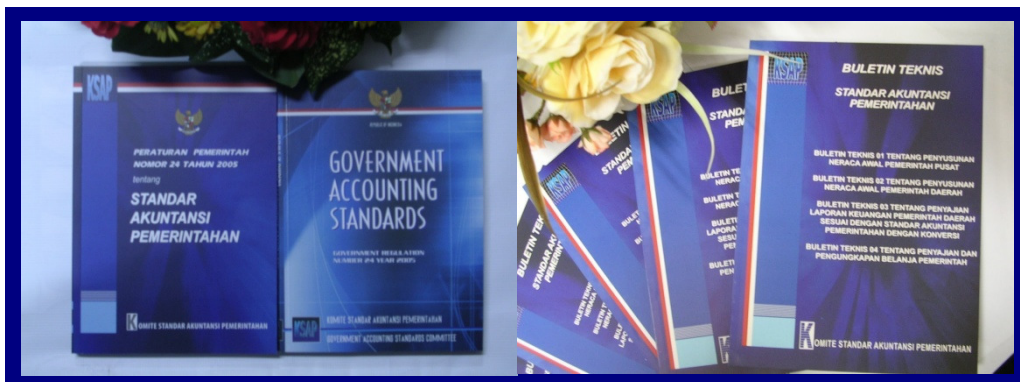




LAPORAN TAHUNAN 2008

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY



LAPORAN TAHUNAN

ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY

**SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan yang harus diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual

(*cash toward accrual*) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Setelah SAP ditetapkan, tugas berikutnya dari KSAP adalah melakukan sosialisasi dan membantu implementasi SAP pada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, SAP berbasis akrual sudah harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk tahun anggaran 2008. Untuk melaksanakan amanat tersebut, mulai tahun 2006, KSAP telah melakukan kajian-kajian dan mulai menyusun draf SAP berbasis akrual yang disempurnakan melalui pembahasan-pembahasan yang mendalam mulai tahun 2007 dan diselesaikan pada tahun 2008 ini. Selanjutnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan hasil kerja KSAP berupa Draft SAP Berbasis Akrual kepada BPK-RI untuk diberikan tanggapan.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2008 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan 2008, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para *stakeholders*, khususnya Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2008 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Juni 2009

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Herry Purnomo

**PENGANTAR
KETUA KOMITE KERJA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Laporan Tahunan 2008 ini disusun sebagai suatu media akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan kinerja KSAP kepada Menteri Keuangan dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laporan ini memuat kegiatan dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2008.

Setelah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, KSAP terus berupaya mendorong implementasi SAP melalui sosialisasi, lokakarya, *Training of Trainers* (TOT), *help desk* serta penyusunan buletin-buletin teknis.

Selama tahun 2008, KSAP telah melakukan penyempurnaan draf SAP berbasis akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Sebagai hasilnya draf SAP berbasis akrual dapat diselesaikan pada akhir tahun 2008 untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, dan kemudian diteruskan kepada BPK-RI untuk diberikan pertimbangan dan tanggapan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan KSAP, Laporan Tahunan 2008 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP Tahun 2008.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif SAP, para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami merasa Laporan Tahunan 2008 belum sempurna, sehingga saran-saran sangat kami harapkan agar penyusunan laporan tahunan berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Juni 2009
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif.....	1
Sambutan Ketua Komite Kerja.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Organisasi dan Kedudukan KSAP	4
B. Tugas Pokok KSAP	6
BAB II RENCANA KERJA KSAP	8
A. Lingkungan Strategis	8
B. Rencana Strategis	8
BAB III KINERJA KSAP	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Pelaksanaan Kegiatan.....	13
C. Aspek Keuangan	21
D. Kendala dan Strategi Pemecahannya	21
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2009	22
BAB V PENUTUP	24

BAB I PENDAHULUAN



Standar Akuntansi Pemerintahan (Government Accounting Standards)

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004.

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 2 Tahun 2005 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan dan mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan (*due process*). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres RI Nomor 2 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai Anggota;
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara sebagai Anggota;
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sebagai Anggota;
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebagai Anggota;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai Anggota;
9. Ketua Dewan Penasihat Magister Akuntansi Universitas Indonesia sebagai Anggota.

Komite Kerja:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc sebagai Anggota;
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Drs. AB Triharta, Ak., MM sebagai Anggota;
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc sebagai Anggota;



Tim Konsultatif dan Tim Kerja KSAP (Dokumentasi Sekretariat KSAP)

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2005, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 8 Januari 2008 dengan KEP-01/K.1/KSAP/II/2008 beranggotakan 30 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MBA, Wakil Ketua;
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota;
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
5. Amdi Very Dharma, Ak., MAcc, Anggota;
6. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA, Anggota;
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
9. Chalimah Puji Astuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
10. Edward UP Nainggolan, Ak., M.Ak., Anggota;
11. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota;
12. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
13. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
14. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota;
15. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
16. Farida Aryani, Ak., Anggota;
17. Eli Tamba, SE, Ak., MM, Anggota;
18. Joko Supriyanto, SST, Ak., Anggota;
19. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
20. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;

22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota;
23. Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Anggota.
24. Iwan Kurniawan S., SE., M.Si., Ak., Anggota;
25. Mhd. Syahman Sitompul, SE., Ak., M.Si., Anggota;
26. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota;
27. Muliani Sulya F., SE., Anggota.
28. Yusron Kamal, SE., MM., Anggota
29. Andri Fuadhy, SE., Anggota
30. Zulfikar Aragani, Anggota

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 346/KM.1/2008, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Mulat Handayani, Ketua;
2. Hamim Mustofa, Wakil Ketua;
3. Rahayu Puspasari, Anggota;
4. Joko Supriyanto, Anggota;
5. Farida Aryani, Anggota;
6. Yulia Candra Kusumarini, Anggota;
7. Yusron Kamal, Anggota;
8. Andri Fuadhy, Anggota;
9. Zulfikar Aragani, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



Rapat Pleno Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Dokumentasi KSAP)

BAB II RENCANA KERJA KSAP

Sesuai dengan tugas yang diembannya, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah berupa rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan. Rencana kerja ini disusun sesuai dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Berbagai hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana diuraikan di atas merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan KSAP dalam mencapai kinerjanya.

A. Lingkungan Strategis

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Pusat/Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPR/DPD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir mulai tahun anggaran 2006. Dengan demikian Pemerintah perlu segera membangun sistem akuntansi yang mengacu kepada SAP. Kebutuhan ini tidak dapat ditunda lagi karena hanya ada waktu satu tahun sejak SAP disahkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SAP supaya dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meminimalkan asimetri informasi antara pemerintah dan pengguna laporan keuangan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Salah satu kriteria pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah kesesuaian laporan yang dimaksud dengan SAP. Dengan telah diterbitkannya PP tentang SAP, maka Pemerintah Pusat/Daerah wajib menerapkan SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Dengan mencermati perkembangan lingkungan strategis tersebut, KSAP memiliki komitmen untuk selalu bekerja secara terarah dan terencana, serta menuangkannya dalam suatu Rencana Strategis KSAP. Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategi pada dasarnya mengarah pada pemberlakuan SAP yang dapat diterima oleh seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan.

B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

Visi :

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"

Misi :

1. Mewujudkan standar akuntansi pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Rencana Kerja Tahun 2004 s.d. Tahun 2008

A. Tahun 2004	
1. Penerbitan PP SAP	1. Penyusunan draf PP SAP 2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP
2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP	1. Penyusunan buletin teknis SAP 1. Neraca Awal 2. Bagan Perkiraan Standar 2. Penyusunan interpretasi SAP (5 ISAP)
3. Sosialisasi PP SAP	Pelaksanaan Sosialisasi PP SAP di lima kota
4. Draft Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual (KK + 7 PSAP) – Sesuai <i>due process</i> KSAP kecuali <i>public hearing</i> dan permintaan pertimbangan BPK 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Finalisasi Draft SAP akrual
5. SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional Seminar/kongres/konferensi internasional
B. Tahun 2005	
1. Penyusunan SAP dan Derivasinya	1. Finalisasi RPP tentang SAP 2. Penyusunan buletin teknis dan interpretasi SAP 3. Penyusunan Draft SAP berbasis akrual ▪ Penyusunan 4 Draft SAP berbasis akrual ▪ Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i>

		▪ Pelaksanaan <i>Public Hearing</i> ▪ Finalisasi Draft SAP
2.	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi SAP di 7 kota 2. Pengembangan SDM KSAP ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional
c. Tahun 2006		
1.	Draf Publikasian (DP) SAP berbasis akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Limited Hearing</i> DP SAP akrual 3. Pelaksanaan <i>Public Hearings</i> 4. Finalisasi Draft SAP akrual
2.	Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	1. Pelaksanaan Lokakarya (<i>Workshop</i>) 2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i>
3.	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional
d. Tahun 2007		
1.	Draf PSAP berbasis Akrual	1. Penyusunan DP standar akuntansi berbasis akrual 2. Pelaksanaan <i>Public Hearing</i> 3. Penyempurnaan Draf Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual
2.	Penerbitan PP Standar Akuntansi berbasis Akrual	
3.	Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP	1. Pelaksanaan Lokakarya/ <i>Workshop</i> 2. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 3. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 4. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i>
4.	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional ▪ Seminar/kongres/konferensi internasional
e. Tahun 2008		
1.	Draf PSAP berbasis Akrual	1. Penyempurnaan DP Kerangka Konseptual dan PSAP berbasis akrual 2. <i>Limited Hearing</i> PSAP Akrual 3. Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan
2.	Sosialisasi/Bantuan Implementasi SAP dan Pelayanan Publik	4. Pelaksanaan <i>Workshop</i> /Sosialisasi SAP dan Bultek Baru SAP CTA 5. Penyelenggaraan <i>Helpdesk</i> 6. Pemeliharaan <i>Website</i> KSAP 7. Penyelenggaraan <i>International Events</i> dan pembentukan asosiasi regional <i>standards setter</i> 8. Survei/Riset Implementasi SAP 9. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan
	SDM KSAP yang andal	Pengembangan SDM: ▪ Pengkajian standar dan praktek akuntansi internasional

- Seminar/kongres/konferensi internasional

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Draf Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu, KSAP telah menyusun draf SAP berbasis akrual mulai tahun 2006. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf kerangka konseptual dan draf PSAP berbasis akrual. Pada tahun ini, sasaran kinerja KSAP adalah penyusunan dan penyempurnaan draf kerangka konseptual dan 12 (dua belas) draf SAP berbasis akrual.

2. Limited Hearing Draf Standar Akuntansi Pemerintahan

Sesuai dengan *due process* penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebelum dimintakan pertimbangan BPK, terlebih dahulu dilakukan *limited hearing* terhadap draf SAP berbasis akrual, guna mendapat masukan dari para praktisi, akademisi dan pemerhati akuntansi pemerintah.

3. Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan

Sesuai dengan *due proses* SAP, draf SAP harus mendapat pertimbangan dari BPK. Indikator kegiatan ini adalah penyampaian draf SAP berbasis akrual pada BPK untuk mendapat pertimbangan.

4. Penyusunan Derivasi Standar Akuntansi Pemerintahan

a. Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan

KSAP akan menerbitkan Interpretasi SAP (IPSAP) yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari kesalahan tafsir para pengguna SAP.

a. Penyusunan Buletin Teknis SAP

KSAP menerbitkan buletin teknis untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

5. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

a. Workshop Buletin Teknis SAP

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai tahun anggaran 2005. Untuk itu, KSAP akan mengadakan workshop mengenai buletin teknis. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2008.

b. Pengembangan kemampuan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Lain-lain**a. Pemeliharaan Website KSAP**

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

b. Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP akan membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

c. Survei/Riset Implementasi SAP

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut.

d. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

BAB III KINERJA KSAP

A. Capaian Kinerja

Sejak awal pembentukannya, KSAP telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka finalisasi standar akuntansi pemerintahan. Sampai dengan akhir tahun 2008, KSAP telah menyelesaikan draf SAP berbasis akrual (Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan SAP) serta menetapkan 1 (satu) Interpretasi SAP yaitu Interpretasi SAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing, dan 2 Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 06 tentang Akuntansi Piutang dan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Kegiatan finalisasi SAP beserta penyusunan derivasinya masih terus dilaksanakan oleh KSAP pada tahun 2008 dan pada tahun-tahun berikutnya. Capaian kinerja KSAP pada tahun 2008 adalah:

- Finalisasi draf SAP berbasis akrual yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 (dua belas) PSAP.
- Penetapan Interpretasi SAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing
- Penetapan Buletin Teknis No. 06 tentang Akuntansi Piutang
- Penetapan Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir
- Penyusunan 2 (dua) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Akuntansi Utang, dan Buletin Teknis tentang Akuntansi Bantuan Sosial
- Penyelenggaraan *Workshop* Buletin Teknis
- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri.
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Finalisasi Draft Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual dilakukan selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan draf Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari draf kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dan 12 (dua belas) draf SAP berbasis akrual dengan menggunakan pendekatan menyesuaikan PSAP *cash toward accrual* (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan PSAP berbasis akrual yang diadaptasi dari IPSAS dan berbagai literatur lainnya.



Tim Sinkronisasi SAP Berbasis Akrual

Keduabelas draf SAP berbasis akrual tersebut adalah:

1. Penyajian Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Akuntansi Persediaan;
6. Akuntansi Investasi;
7. Akuntansi Aset Tetap;
8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. Akuntansi Kewajiban;
10. Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Estimasi dan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Mendasar dan Pos Luar Biasa;
11. Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
12. Laporan Operasional.

Sesuai dengan Disposisi Pimpinan Departemen Keuangan pada awal tahun 2008, KSAP diminta untuk menyelesaikan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2008.



Pertemuan KSAP dengan BPK

Sebagai langkah awal, pada bulan April 2008 KSAP mengadakan pertemuan dengan Tim Penelaah SAP BPK- RI yang bertujuan untuk pembahasan awal draf SAP berbasis akrual. Pada pertemuan tersebut, BPK menyampaikan masih banyak opini *disclaimer* yang diberikan kepada

laporan keuangan Pemda, karena mereka belum melaksanakan PP 24/2005 secara utuh. Selain itu, BPK menanyakan kepada KSAP apakah akan segera berpindah ke basis akrual.

KSAP sebagai *standar setter* bersepakat untuk tetap menyiapkan SAP berbasis akrual, dan menyiapkan strategi implementasi SAP akrual di masa mendatang. KSAP telah melakukan penyempurnaan draf SAP Akrual, dan menyiapkan akademik paper implementasi SAP berbasis akrual.

KSAP telah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan untuk menjelaskan perkembangan Akuntansi Pemerintahan dan amanat UU Keuangan Negara untuk menerapkan akuntansi dengan basis akrual. Menteri Keuangan meminta diadakannya pertemuan konsultatif antara Pemerintah, BPK dan DPR untuk membahas permasalahan akuntansi dengan basis akrual.



KSAP melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan

Sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Menteri Keuangan diadakan rapat konsultatif antara Pemerintah dan DPR. BPK juga diundang oleh DPR tetapi tidak hadir dalam konsultasi tersebut disepakati bahwa penerapan SAP Berbasis Akrual tetap dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009, diawali dengan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, kemudian pemerintah menyiapkan tahapan-tahapan implementasi SAP berbasis akrual. Bagi Pemerintah Pusat, hasil konsultasi Pemerintah dengan DPR tersebut kemudian dituangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN TA 2009, yang menyebutkan bahwa penerapan pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan tahun 2009 dilaksanakan secara bertahap pada badan layanan umum, dan laporan keuangan pemerintah pusat dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

2. *Limited Hearing* *Draf Standar Akuntansi Pemerintahan*

Sesuai dengan *due process* penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebelum dimintakan pertimbangan BPK, terlebih dahulu dilakukan *limited hearing* terhadap draf SAP Berbasis Akrual, guna mendapat masukan dari para praktisi, akademisi, dan pemerhati akuntansi pemerintahan.

KSAP pada tahun 2008 telah mengadakan *limited hearing* yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Desember 2008 bertempat di Hotel Borobudur dengan peserta sebanyak 60 peserta yang terdiri dari praktisi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akademisi, dan pemerhati akuntansi pemerintahan.

Dari kegiatan ini diperoleh beberapa masukan terkait isi draf SAP Berbasis Akrua, yang menjadi pertimbangan KSAP dalam memfinalkan SAP Berbasis Akrua.



Suasana Limited Hearing SAP Berbasis Akrua

3. *Permintaan Pertimbangan BPK dan Pembahasan*

Sesuai dengan *due process* SAP, draf SAP harus mendapat pertimbangan dari BPK. Untuk itu, pada akhir tahun 2008, Menteri Keuangan telah menyerahkan draf Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang telah disusun oleh KSAP untuk mendapat pertimbangan BPK, melalui surat Nomor S-750/MK.05/2008 tanggal 31 Desember 2008. Pada surat tersebut disebutkan bahwa KSAP akan melakukan pembahasan-pembahasan dengan BPK dengan memberikan tanggapan, penjelasan dan melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan BPK, sebelum SAP berbasis akrua ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

4. *Penyusunan Derivasi Standar Akuntansi Pemerintahan*

a. *Penyusunan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan*

Pada tahun 2008 KSAP menerbitkan 1 IPSAP, yaitu Interpretasi Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang asing. IPSAP tersebut merupakan interpretasi dari PSAP No. 02 paragraf 62 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penyusunan IPSAP tersebut untuk menindaklanjuti permintaan pemerintah melalui Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan kepada KSAP Nomor S-293/PB.7/2008 tanggal 14 Mei 2008 perihal Kajian Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Terkait Transaksi Dalam Mata Uang

Asing. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa terdapat penyimpangan dari SAP terkait dengan penggunaan kurs mata uang asing yang dipermasalahkan oleh BPK.

Sebagai tanggapan atas surat tersebut, KSAP melakukan kajian dan diskusi dengan para *stakeholder* di antaranya Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Hasil kajian dan diskusi tersebut, KSAP merumuskan Konsep Interpretasi PSAP tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2008.

b. Penyusunan Buletin Teknis SAP

Pada tahun 2008 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi PP 24/2005. Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Oleh karena itu, KSAP pada tahun 2008 telah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk memilih topik-topik buletin teknis yang akan disusun KSAP pada tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya. Adapun topik buletin teknis yang diminta oleh pemma antara lain:

1. Aset Tetap;
2. Pendapatan;
3. Kerjasama Operasi;
4. Persediaan;
5. Bantuan Sosial;
6. Aset Lainnya;
7. Pertukaran Aset.

Dalam Tahun 2008, KSAP telah menetapkan beberapa topik buletin teknis SAP sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Akuntansi Piutang
2. Buletin Teknis tentang Leasing
3. Buletin Teknis tentang Akuntansi Dana Bergulir
4. Buletin Teknis tentang Bantuan Sosial
5. Buletin Teknis Utang
6. Buletin Teknis tentang Hibah
7. Buletin Teknis tentang Pinjaman Luar Negeri
8. Buletin Teknis tentang Penerusan Pinjaman

Dari beberapa buletin Teknis tersebut telah ditetapkan 2 buah untuk dibuat pada tahun 2008 yaitu Buletin Teknis SAP No. 06 tentang Akuntansi Piutang, dan Buletin Teknis SAP No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir.



Tim Kecil Buletin Teknis
Dana Bergulir sedang
diskusi

Buletin Teknis tentang leasing berdasarkan hasil tim kecil dinyatakan belum diperlukan, sehingga tidak diteruskan.

Pada tahun 2008 KSAP telah menyelesaikan draft Buletin Teknis tentang Bantuan Sosial. Draft tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan untuk mendapatkan masukan/tanggapan.

Buletin Teknis Utang dan Buletin Teknis tentang Pinjaman Luar Negeri disepakati digabung menjadi satu dengan Judul Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi Utang. Pada akhir tahun 2008 draft Buletin Teknis tentang Akuntansi Utang disepakati dan akan difinalkan pada tahun 2009.

5. *Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan*

Kegiatan 1: Workshop Buletin Teknis : Akuntansi Penyusutan, Akuntansi Piutang dan Akuntansi Dana Bergulir



Dirjen Perbendaharaan membuka Workshop Buletin Teknis SAP di Jakarta

Pada tahun 2008 ini, KSAP telah menyelenggarakan workshop SAP Buletin Teknis.SAP : Akuntansi Penyusutan, Akuntansi Piutang, dan Akuntansi Dana Bergulir. Workshop yang diadakan pada hari Rabu, 17 Desember 2008, bertujuan untuk melakukan sosialisasi awal atas 3 buah bultek yang baru diterbitkan yaitu Bultek 05, 06 dan 07 dengan dihadiri para praktisi baik dari lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun dari Kementerian Lembaga/Negara yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah.



Antusiasme Peserta Workshop dari berbagai Unsur

Kegiatan 2: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, yaitu:

1. *The International of Internal Auditors International Conference*, San Francisco, California, USA, 6-9 Juli 2008, Perwakilan KSAP Dr. Binsar H. Simanjuntak, sebagai Pembicara dan Peserta.

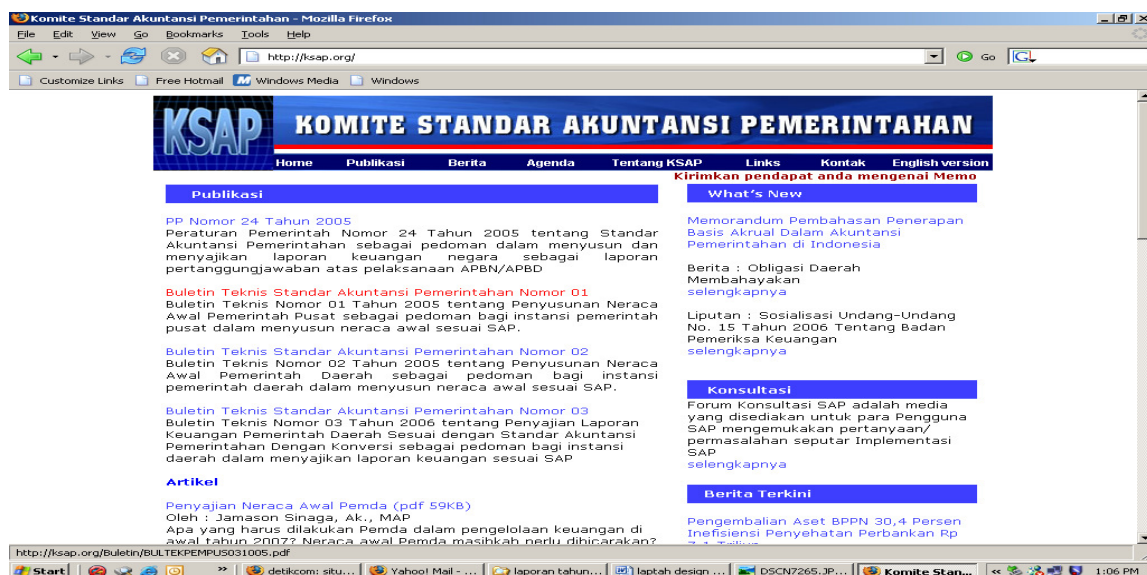


Andrew Urban Berbicara tentang Accrual Accounting di Pemerintahan

Kegiatan 3: Pemeliharaan *Website* KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*. Pada *website* tersebut juga tersedia email para anggota KSAP.

Selama tahun 2008, KSAP telah berhasil meng *up-grade* tampilan maupun isi dari situs KSAP. Perbaikan tampilan dimaksudkan agar situs KSAP menjadi lebih menarik dan lebih informatif serta memberikan peluang lebih luas kepada pengunjung situs. Selain itu dengan tambahan menu *English Version* pada tampilan yang baru diharapkan dunia internasional dapat mengenal produk-produk KSAP terutama Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah tersedia dalam versi bahasa Inggris. Kegiatan pemeliharaan lainnya adalah meng-*update* berita, produk-produk maupun *link* dengan kegiatan reformasi keuangan negara lainnya.



Keterangan : Tampilan Website KSAP <http://www.ksap.org>

Kegiatan 4: Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Komite Kerja tanggal 5 Oktober 2006. Tim ini terdiri dari 4 (empat) orang Komite Kerja, dan 9 orang Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

Selama tahun 2008 KSAP telah menanggapi beberapa pertanyaan antara lain yang terkait dengan telaah Permendagri 13/2006, Perlakuan Akuntansi atas transaksi Perjanjian Karya *Production Sharing*, Penilaian aset pada Neraca Awal Pemerintah Pusat, Pengakuan Investasi

Deposito, Akuntansi pada Pusat Investasi Pemerintah sebagai BLU, dan Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing. Tanggapan disampaikan secara tertulis dan telah dipublikasikan dalam *website* KSAP.

Kegiatan 5: Pelayanan Publik

Pada tahun 2008, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP.

C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2008, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp3.530.570.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan – Departemen Keuangan. KSAP telah merealisasikan sebesar Rp3.297.561.020 atau sekitar 93,40% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2008:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah revisi	Realisasi Belanja	Persentase
51	Belanja Pegawai	1.123.200.000	1.108.200.000	98,66%
52	Belanja Barang	2.261.150.000	2.067.041.020	91,42%
53	Belanja Modal	146.220.000	122.320.000	83,65%
Jumlah		3.530.570.000	3.297.561.020	93,40%

Laporan Keuangan KSAP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

D. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Tahun 2008 KSAP berencana menerbitkan kamus istilah Akuntansi Pemerintahan, tetapi sampai dengan akhir tahun belum dapat diterbitkan karena draf yang disusun belum sempurna. Direncanakan tahun 2009 akan diselesaikan.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2009

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2009 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2009 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Finalisasi Draf SAP Berbasis Akrual

Pada tahun 2008 KSAP telah menyelesaikan Draf SAP berbasis akrual, dan direncanakan tahun 2009 KSAP akan melakukan pembahasan secara mendalam dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam rangka pelaksanaan *due process* permintaan pertimbangan kepada BPK-RI. Setelah mendapat persetujuan dari BPK-RI maka Draf SAP berbasis akrual dapat difinalisasi menjadi Peraturan Pemerintah pengganti PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP.

2. Penyusunan Buletin Teknis SAP CTA

Pada tahun 2009, KSAP akan melakukan finalisasi 2 (dua) buletin teknis SAP dan menyusun 5 (lima) buletin teknis SAP. Penentuan Topik Buletin Teknis SAP ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KSAP bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, kepada para pengguna SAP termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP berbasis kas menuju akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

4. Workshop SAP (*cash toward accrual*) dan Buletin Teknis Baru SAP CTA

Pada tahun 2009 KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai SAP dan buletin teknis baru *cash towards accrual*. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan.

5. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

7. Pemeliharaan Helpdesk

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk pada tahun 2006 akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2009. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently*

Asked Question (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/ pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

8. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

9. Survei/Riset Implementasi SAP

Survei/Riset Implementasi SAP ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana para pengguna SAP menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, dan masalah-masalah apa saja yang ditemukan selama penerapan SAP tersebut. Selain itu, riset juga dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan implementasi SAP berbasis akrual. Akan dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka melakukan riset ini. KSAP akan menampilkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan SAP.

10. Penyusunan Kamus Istilah Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama terhadap suatu istilah dalam akuntansi pemerintahan dan juga untuk mempermudah para pengguna akuntansi pemerintahan dalam memperoleh pengertian suatu istilah akuntansi pemerintahan, maka pada tahun 2009 KSAP akan menyusun suatu kamus istilah akuntansi pemerintahan.

11. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

12. *International Events*

Untuk mensejajarkan KSAP dengan *government/public accounting standard setting body* di dunia internasional, maka pada tahun 2009 KSAP akan menyelenggarakan *International Events*. Hal ini masih bersifat tentatif tergantung dari proses finalisasi draf SAP akrual yang dapat dijadikan momentum penyelenggaraan seminar dan ketersediaan anggaran.

BAB V PENUTUP

Laporan Tahunan 2008 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



KSAP bertukar pikiran dengan para ahli

Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021 3524551
Website. ksap.org
Email. webmaster@ksap.org ; ksap_info@yahoo.com